



## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, SUBSIDI DAN INFLASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2024

Irsyadul Ishlah Syamsu<sup>1</sup>, Ahsani Paramita<sup>2</sup>, Qarina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [irsyadulishlah@gmail.com](mailto:irsyadulishlah@gmail.com)

**Abstract.** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah, subsidi dan inflasi memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia di Sulawesi selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program Eviews12. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat time series dalam kurun waktu 16 tahun dari tahun 2009-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Sulawesi selatan, belanja subsidi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Sulawesi selatan sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Keywords: Pengeluaran Pemerintah, Subsidi, Inflasi Indeks Pembangunan Manusia

### 1. PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang Masalah

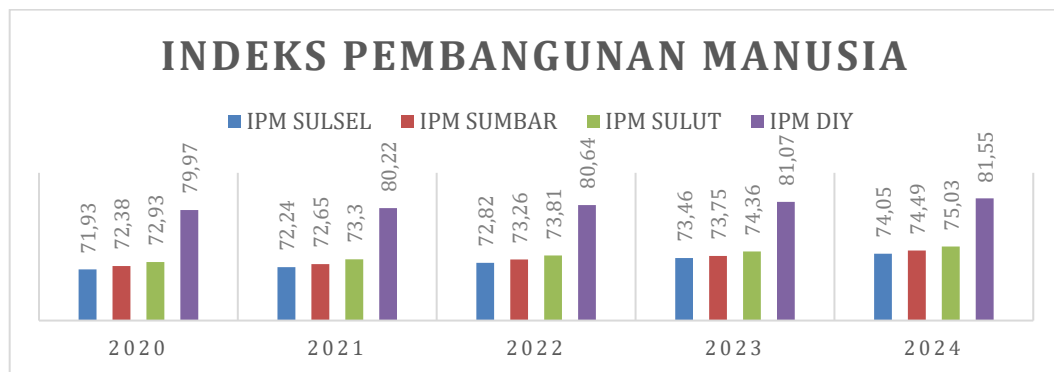
Pembangunan nasional dan pembangunan manusia saling melengkapi dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan, mencakup ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, dan infrastruktur sebagai fondasi kemajuan negara secara holistik. Sementara itu, pembangunan manusia berfokus pada pengembangan potensi individu dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. (BPS, 2023).

Sebagai alat ukur keberhasilan kedua proses tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan UNDP digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup (kemampuan daya beli). Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara. (Mulia & Saputra, 2020)

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian indeks pembangunan manusia, Salah satu instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut adalah belanja modal. Pemerintah daerah

mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan menyediakan sarana serta prasarana publik. Namun, selama ini porsi belanja daerah lebih banyak terserap untuk belanja rutin yang kurang produktif, sehingga perlu pergeseran komposisi belanja menuju kegiatan pembangunan dan layanan publik yang lebih berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rizal & Erpita, 2019) subsidi dapat berupa bantuan materi, uang tunai, kebutuhan pokok, barang, hingga keringanan biaya tertentu. Penerima utamanya adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, sehingga subsidi menjadi mekanisme pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus menekan kemiskinan. Dana subsidi ini bersumber dari pajak yang kemudian dikembalikan ke masyarakat, sehingga uang pajak yang dipungut pemerintah kembali lagi dalam bentuk dukungan sosial. Dengan demikian, kebijakan subsidi berperan langsung dalam memperkuat *purchasing power* masyarakat yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia. (Soen et al., 2022).

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Terdapat tiga kriteria utama untuk menandai terjadinya inflasi, yaitu adanya kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung berkelanjutan. (Ardiansyah, 2017). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga dimensi penting dalam pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan akan umur panjang dan hidup sehat, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, serta kemampuan untuk memenuhi standar hidup yang layak. Ketika tingkat kesehatan tenaga kerja meningkat, pengetahuan yang mereka miliki semakin tinggi, dan akses terhadap kehidupan yang layak semakin baik, maka kualitas hasil kerja juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi pembangunan manusia tersebut berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia yang siap bekerja, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. (Mahroji & Nurkhasanah, 2019)



Sumber data: Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan (2025)

Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 (Indeks)

Berdasarkan Grafik 1.1, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, dari 71,93 pada tahun 2020 menjadi 74,05 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di provinsi tersebut. Namun, capaian ini masih relatif lebih rendah dibandingkan tiga provinsi perbandingan, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2024, IPM Sulawesi Selatan (74,05) masih berada di bawah IPM Sulawesi Utara (75,03), Sumatera Barat (74,49), dan terutama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki capaian tertinggi sebesar (81,55).

Meskipun terjadi peningkatan IPM di Sulawesi Selatan selama periode 2020–2024, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi peran kebijakan fiskal daerah. Salah satu instrumen kebijakan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah belanja modal, Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Selain belanja modal, belanja subsidi juga menjadi komponen penting dalam upaya meningkatkan IPM, Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Faktor lain yang turut memengaruhi IPM adalah inflasi, Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Menurut Sen, keberhasilan pembangunan tercermin dalam peningkatan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang pada akhirnya diukur melalui IPM. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun dukungan fiskal melalui belanja modal dan belanja subsidi telah digelontorkan serta inflasi relatif terkendali, capaian IPM Sulawesi Selatan masih belum optimal.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang diambil pada studi ini adalah data sekunder yang berbentuk time series dalam kurun waktu 2009-2024. Studi ini menggunakan pendekatan literatur yang melibatkan mengumpulkan dan meneliti data berasal dari berbagai referensi termasuk buku, tulisan, jurnal, atau sumber lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi: data indeks pembangunan manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam periode 2009-2024, data belanja modal dan belanja subsidi diperoleh dari Portal data SIKD dalam periode 2009-2024, data inflasi diperoleh dari Badan Pusat statistik dalam periode 2009-2024.

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda yang diprogram dengan software Eviews12 sebagai alat bantu analisis data. Akan diuji melalui analisis kuantitatif dengan persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X<sub>1</sub> = Pengeluaran Pemerintah

X<sub>2</sub> = Subsidi

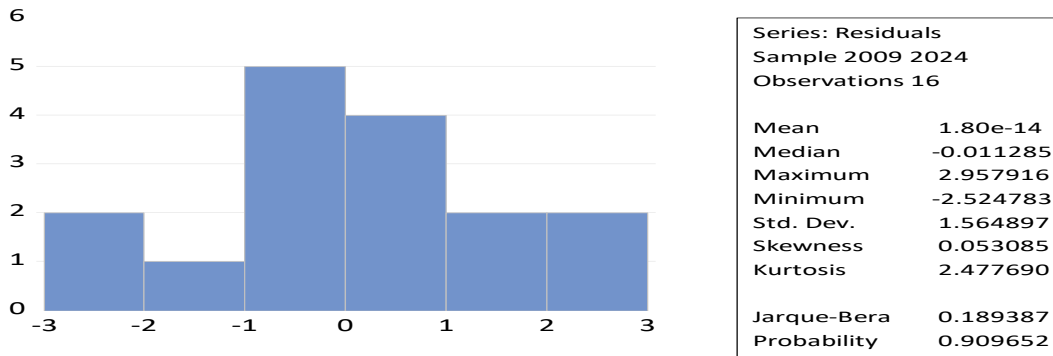
X<sub>3</sub> = Inflasi

β<sub>0</sub> = konstanta (intersep)

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> = koefisien regresi untuk masing-masing variabel indeviden ε = error term (kesalahan residu)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik



**Gambar 1 Uji Normalitas**

Gambar 1 memperlihatkan hasil dari Uji Normalitas terhadap data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan tes J-B. Dari hasilnya, diperoleh nilai probabilitas J-B sebesar  $0,909652 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dalam studi ini distribusi normal.

**Tabel 2 Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
Date: 09/25/25 Time: 21:10  
Sample: 2009 2024  
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1408.581	7362.412	NA
X1	1.84E-08	8291.985	1.348502
X2	1.29E-09	349.6246	1.281238
X3	0.067749	6.947543	1.276409

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan nilai VIF pada tabel diatas menunjukkan nilai X1 Belanja Modal sebesar 1,348, X2 Belanja Subsidi sebesar 1,281, dan X3 Inflasi sebesar 1,276. Nilai yang diperoleh lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi mutikolinearitas.

**Tabel 3 Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.848688	Prob. F(9,6)	0.6042
Obs*R-squared	8.960944	Prob. Chi-Square(9)	0.4409
Scaled explained SS	3.724170	Prob. Chi-Square(9)	0.9286

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025



Berdasarkan nilai prob. Chi-square sebesar 0,9286 yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4 Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.151333	Prob. F(2,10)	0.1671
Obs*R-squared	4.813274	Prob. Chi-Square(2)	0.0901

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,0901 yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda**

Variance Inflation Factors  
Date: 09/25/25 Time: 21:10  
Sample: 2009 2024  
Included observations: 16

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1408.581	7362.412	NA
X1	1.84E-08	8291.985	1.348502
X2	1.29E-09	349.6246	1.281238
X3	0.067749	6.947543	1.276409

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Hasil persamaan yang didapatkan berdasarkan hasil regresi dijelaskan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar -14.47026 Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ketika Belanja Modal (X1), Belanja Subsidi (X2) dan Inflasi (X3) memiliki nilai konstanta atau tidak mengalami perubahan maka Belanja Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar -14.47026%. (2) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal (X1) sebesar 0.000268 yang artinya Belanja Modal dan IPM memiliki pengaruh positif yaitu ketika Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp 1 maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 0.000268% dan sebaliknya. (3) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Subsidi (X2) sebesar 0.000037 yang artinya Belanja Subsidi dan IPM memiliki pengaruh positif yaitu ketika Belanja Subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp 1 maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 0.000037% dan sebaliknya. (4) Nilai koefisien regresi variabel Inflasi (X3) sebesar -0.603990 yang artinya Inflasi dan IPM memiliki pengaruh negatif yaitu Ketika Inflasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka IPM akan mengalami penurunan sebesar -0.603990% dan sebaliknya.

**Tabel 6 Hasil Uji Determinan R-Square**

R-squared	0.594617	Mean dependent var	70.23125
Adjusted R-squared	0.493271	S.D. dependent var	2.457836
S.E. of regression	1.749609	Akaike info criterion	4.168979
Sum squared resid	36.73356	Schwarz criterion	4.362126
Log likelihood	-29.35183	Hannan-Quinn criter.	4.178870
F-statistic	5.867203	Durbin-Watson stat	1.003418
Prob(F-statistic)	0.010506		

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan hasil output regresi, nilai R-square sebesar 0,594 dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel independen dan variabel dependen menjelaskan sekitar 0,594 yang jika dikonversi ke dalam bentuk persen sebesar 59,46 persen. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan proporsi atau persentase kontribusi variabel bebas (seperti pengeluaran pemerintah, subsidi dan inflasi) terhadap variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu sebesar 59,46 persen. Sisanya sekitar 40,54 persen, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Tabel 7 Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.47026	37.53107	-0.385554	0.7066
X1	0.000268	0.000136	1.975912	0.0716
X2	3.70E-05	3.59E-05	1.031945	0.3224
X3	-0.603990	0.260287	-2.320480	0.0387

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Hasil output diatas mengkonfirmasi besaran signifikansi yang dihasilkan dari uji regresi. Hasil diatas menunjukkan pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y. Variabel X1 memiliki nilai probabilitas 0,0716 yaitu variabel belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia, nilai koefisien regresi 14,47026 dengan nilai probabilitas  $0,0215 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,975 > t_{tabel} 2,179$  menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif namun signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak.

Variabel X2 memiliki nilai probabilitas 0,3224 yaitu variabel belanja subsidi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, nilai koefisien regresi 0,000037 dengan nilai probabilitas  $0,1727 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,031 < t_{tabel} 2,179$  menunjukkan bahwa variabel belanja subsidi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak.

Variabel X3 memiliki nilai probabilitas 0,0387 yaitu variabel inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, nilai koefisien regresi -0,603990 dengan nilai probabilitas  $0,0387 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -2,320 > t_{tabel} 2,179$  menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

**Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)**



R-squared	0.594617	Mean dependent var	70.23125
Adjusted R-squared	0.493271	S.D. dependent var	2.457836
S.E. of regression	1.749609	Akaike info criterion	4.168979
Sum squared resid	36.73356	Schwarz criterion	4.362126
Log likelihood	-29.35183	Hannan-Quinn criter.	4.178870
F-statistic	5.867203	Durbin-Watson stat	1.003418
Prob(F-statistic)	0.010506		

Sumber : Data diolah Eviews12, 2025

Berdasarkan output regresi, nilai F yang signifikan adalah 0,01, lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan variabel dependen mampu menjelaskan pengaruh yang terjadi pada variabel independen.

### Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan IPM, namun pengaruhnya tidak signifikan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada. Artinya, meskipun secara teori peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan IPM, dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan dampaknya belum cukup kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi pengeluaran yang belum optimal, lemahnya efektivitas program pembangunan, atau distribusi anggaran yang belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berperan langsung dalam peningkatan IPM.

Hal ini tidak sejalan dengan teori Human Capital dalam (Mukhlis, 2021) yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Secara teoritis, melalui belanja modal pemerintah dapat menyediakan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil, sementara peningkatan layanan kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal di Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang optimalnya alokasi belanja modal, lemahnya efektivitas program pembangunan, atau distribusi anggaran yang belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pratama & Ariza, 2024), (Astriani et al., 2021) dan (Ningsi, 2023) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, Hal ini terjadi karena ketidaktepatan sasaran dalam alokasi belanja modal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Setiawan & Budiana, 2015), (Tarumingkeng et al., 2018) dan (Refrian, 2021) Penelitian tersebut menemukan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM artinya setiap peningkatan alokasi belanja

modal dalam APBD akan mendorong peningkatan angka IPM sebagai wujud peningkatan kesejahteraan sosial dari segi pendidikan dan kesehatan.

### **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Pemerintah**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Belanja Subsidi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara belanja subsidi dengan IPM, namun pengaruhnya tidak signifikan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada. Artinya, meskipun secara teori peningkatan belanja subsidi diharapkan mampu meningkatkan IPM, dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan dampaknya belum cukup kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, nilai subsidi yang terlalu kecil, atau penggunaan subsidi yang lebih bersifat konsumtif dibanding produktif.

Secara teori Musgrave (1989) dalam (Paul et al., 2019) menjelaskan bahwa subsidi merupakan instrumen alokasi pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kegagalan pasar dan membantu kelompok masyarakat rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perspektif Social Safety Net Theory, subsidi dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang menjaga agar kelompok masyarakat miskin tetap dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia. Dengan demikian, secara teoritis subsidi seharusnya memiliki hubungan positif dengan IPM. (Lestari, 2021)

Namun, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Endogenous Growth Theory yang dikemukakan oleh Romer (1986; 1990) dalam (Nurlaili & Sugiharti, 2023) yang menekankan bahwa pembangunan jangka panjang lebih ditentukan oleh investasi pada modal manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Jika belanja subsidi lebih banyak diarahkan pada konsumsi jangka pendek yang tidak menambah modal manusia, maka pengaruhnya terhadap IPM akan sangat terbatas. Hal ini juga ditegaskan oleh World Bank yang menyatakan bahwa subsidi konsumtif umumnya hanya memberikan manfaat sementara, sedangkan peningkatan IPM membutuhkan intervensi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. (World Bank, 2018)

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Pemerintah**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan IPM, dimana ketika inflasi meningkat maka IPM menurun, sedangkan ketika inflasi menurun maka IPM meningkat. Hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga merupakan faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia.

Hasil ini sejalan dengan teori Keynes dalam (B. B. Siagian et al., 2025) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat sehingga menghambat kesejahteraan. teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika orang hidup di luar kemampuan ekonomi mereka. Ketika permintaan masyarakat akan barang dan jasa melebihi kuantitas yang tersedia, hal ini menyebabkan kesenjangan inflasi atau Kesenjangan Inflasi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hasibuan et al., 2020), (Mahendra, 2020) dan (Octavia et al., 2023) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, hal ini membuktikan bahwa inflasi yang tinggi menekan daya beli masyarakat sehingga menurunkan indeks pembangunan manusia, karena kenaikan harga kebutuhan pokok mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar hidup layak.





<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Pangesti & Susanto, 2018), (Kiha et al., 2021) dan (Oktaviana, 2022) yang menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh adanya program kompensasi atau intervensi pemerintah seperti subsidi pangan, bantuan sosial, dan program perlindungan masyarakat miskin yang mampu menekan dampak buruk inflasi terhadap kesejahteraan Masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
2. Belanja Subsidi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardiansyah, H. (2017). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3), 327–340.
- BPS. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2023. *Publikasi*, 18, 1–282.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>.